

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PAD mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan yang besar terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan demikian, tingkat PAD dapat dijadikan indikator kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan serta mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya secara efektif .

Tingginya PAD suatu wilayah dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki basis ekonomi yang kuat, administrasi perpajakan yang efisien, serta aktivitas ekonomi masyarakat yang dinamis . Sebaliknya, rendahnya PAD menunjukkan keterbatasan daerah dalam menggali potensi sumber daya yang dimiliki serta ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kapasitas dan penyediaan layanan . Oleh karena itu , (Mardiasmo, 2008) menegaskan bahwa tingginya PAD merupakan salah satu keberhasilan daerah dalam melaksanakan otonomi , karena menunjukkan kemampuan dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara optimal serta menunjukkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah .

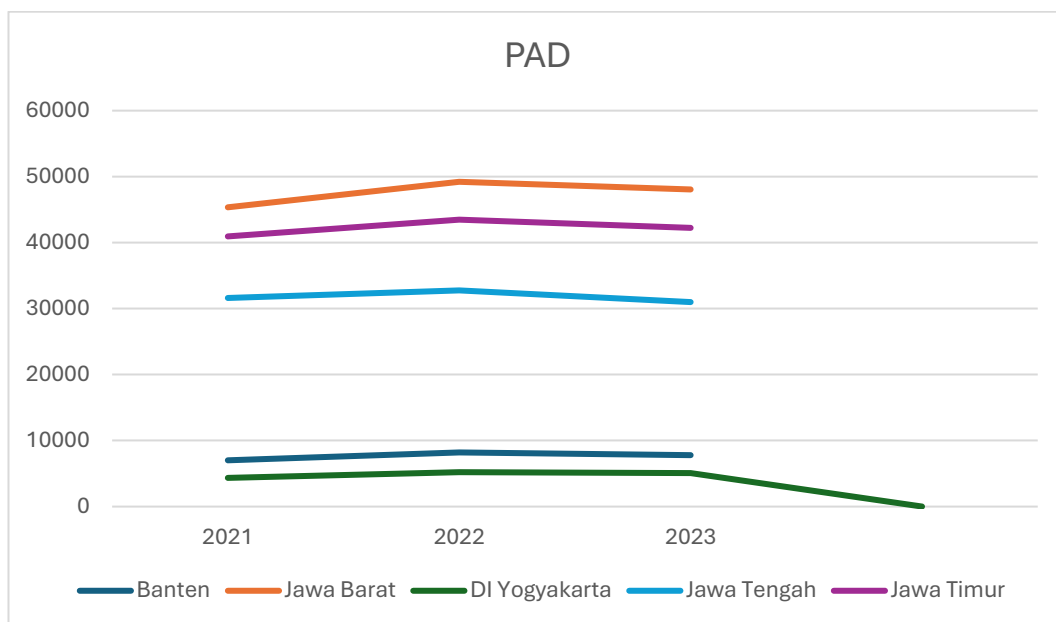
Peran PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin penting seiring dengan diterapkannya desentralisasi fiskal pascareformasi tahun 1999. Melalui Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan.

Di Indonesia, peran PAD dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah menjadi semakin penting seiring dengan diterapkannya desentralisasi fiskal pascareformasi tahun 1999. Melalui Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang -Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pemerintah mendorong setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi PAD guna memperkuat kapasitas fiskalnya secara berkelanjutan.

Apabila ditinjau secara nasional, Pulau Jawa memiliki posisi strategis sebagai pusat utama pertumbuhan dan aktivitas ekonomi di Indonesia. Dominasi ekonomi pulau dapat ditunjukkan dari tingginya kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Yang menyumbangkan lebih dari 50% pada total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Namun, meskipun Pulau Jawa menunjukkan peran yang sangat besar dalam struktur perekonomian nasional, kondisi tersebut masih diiringi oleh persoalan disparitas kontribusi ekonomi antar provinsi di dalamnya, yang ditunjukkan pada ketidakseimbangan pendapatan asli daerah (PAD) Antar provinsi di pulau jawa.

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Daerah Di Pulau Jawa



Sumber : Kementrian Keuangan Tahun 2013-2024

Berdasarkan Grafik pada table 1.1 perkembangan PAD provinsi-provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2021 hingga 2023, terlihat bahwa tren PAD cenderung mengalami peningkatan di tahun 2022, namun menurun kembali pada tahun 2023. Jawa Barat memiliki PAD tertinggi dibandingkan provinsi lainnya, dengan kenaikan cukup signifikan pada 2022 sebelum sedikit menurun di 2023. Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan pola serupa, yaitu meningkat pada 2022 dan kembali menurun pada 2023, meskipun nilainya tetap relatif tinggi dibanding provinsi lainnya. Banten juga mengalami tren kenaikan pada 2022 dan sedikit penurunan pada 2023, namun nilainya masih lebih rendah dibanding tiga provinsi besar sebelumnya. Sementara itu, DI Yogyakarta memperlihatkan kondisi berbeda, di mana setelah mengalami kenaikan di 2022, PAD justru turun drastis hingga hampir mendekati nol pada 2023. Secara keseluruhan, pola ini menunjukkan bahwa meskipun PAD provinsi di Jawa sempat meningkat pada 2022, pada 2023 sebagian besar daerah menghadapi penurunan, yang bisa

disebabkan oleh faktor ekonomi makro, penurunan penerimaan pajak/retribusi, atau kebijakan fiskal yang berbeda di tiap daerah.

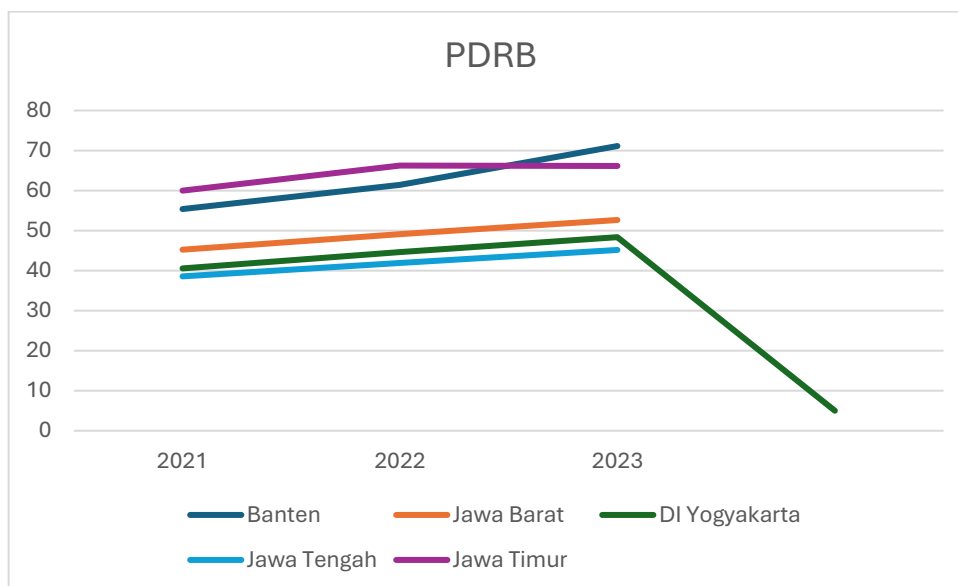
Sebaliknya, provinsi seperti Daerah Istimewa Yogyakarta dan Banten mencatatkan PAD yang lebih rendah, meskipun secara geografis masih berada di Pulau Jawa. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas fiskal dan efektivitas pengelolaan potensi ekonomi oleh masing-masing pemerintah daerah. Sementara Jawa Tengah berada pada posisi menengah dalam hal perolehan PAD, namun masih menghadapi tantangan dalam optimalisasi sumber pendapatan daerah.

Dengan demikian, meskipun Pulau Jawa secara agregat merupakan terbesar terhadap perekonomian Indonesia, kondisi internal antar provinsinya masih menunjukkan disparitas fiskal yang cukup mencolok. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut terhadap faktor yang memengaruhi ketimpangan PAD di Pulau Jawa, guna mendorong kebijakan fiskal yang lebih inklusif dan berkeadilan antarwilayah.

Salah satu utama yang mendasari terjadinya disparitas PAD antarprovinsi di Pulau Jawa adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masing-masing daerah. Provinsi dengan PDRB yang tinggi umumnya memiliki basis ekonomi yang lebih kuat, aktivitas sektor dan jasa yang lebih berkembang, serta pendapatan masyarakat yang lebih besar, yang pada akhirnya mendorong tingginya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah. Sebaliknya, provinsi dengan PDRB lebih rendah akan menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi PAD karena kapasitas ekonomi yang terbatas. Hal ini sejalan dengan pendapat (Mardiasmo, 2008), yang menyatakan bahwa kemampuan daerah dalam

menghasilkan PAD sangat dipengaruhi oleh kapasitas ekonominya, di mana daerah dengan aktivitas ekonomi tinggi cenderung memiliki potensi fiskal yang lebih besar.

Gambar 1.2 Produk Dimestik Regional Bruto Pulau Jawa



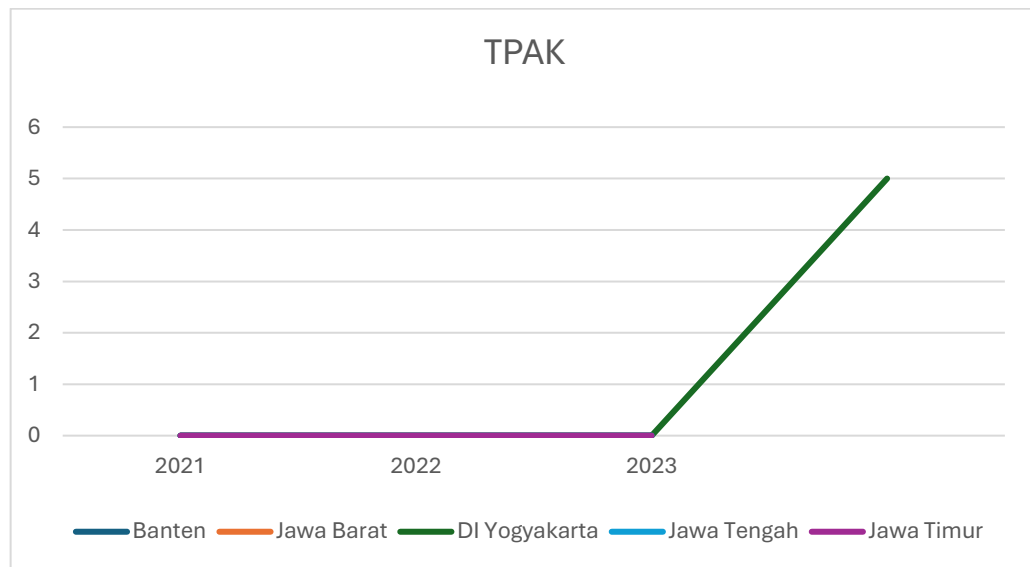
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2023

Berdasarkan grafik pada pada table 1.2 perkembangan PDRB provinsi-provinsi di Pulau Jawa periode 2021–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat perbedaan signifikan antar daerah. Banten menunjukkan pertumbuhan paling konsisten dengan kenaikan tajam hingga 2023, menempatkannya di posisi tertinggi dibandingkan provinsi lain. Jawa Timur juga memperlihatkan tren positif dengan peningkatan dari 2021 ke 2022, meskipun pada 2023 pertumbuhannya cenderung melambat. Jawa Barat dan Jawa Tengah mengalami peningkatan stabil dari tahun ke tahun dengan kenaikan yang relatif moderat. Sementara itu, DI Yogyakarta menunjukkan pola yang berbeda. setelah mengalami kenaikan pada 2021–2022, pada tahun 2023 justru terjadi penurunan drastis hingga mencapai titik terendah

dibanding provinsi lain. Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan bahwa meskipun PDRB di Pulau Jawa cenderung meningkat, masih terdapat ketimpangan pertumbuhan antarprovinsi, dengan Banten dan Jawa Timur yang unggul, sementara DI Yogyakarta menghadapi tantangan serius dalam menjaga stabilitas ekonominya.

Selain itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga berpotensi terkait kontribusinya terhadap disparitas PAD. TPAK yang tinggi mencerminkan terserapnya tenaga kerja dalam berbagai sektor ekonomi formal maupun informal, yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi dan potensi pajak daerah. Provinsi dengan TPAK rendah cenderung memiliki kontribusi PAD yang lebih kecil karena rendahnya daya dorong ekonomi dari sisi tenaga kerja produktif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Suparmoko, 2002), yang menjelaskan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu produksi utama yang berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pada akhirnya berdampak pada penerimaan PAD.

Gambar 1.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Pulau Jawa



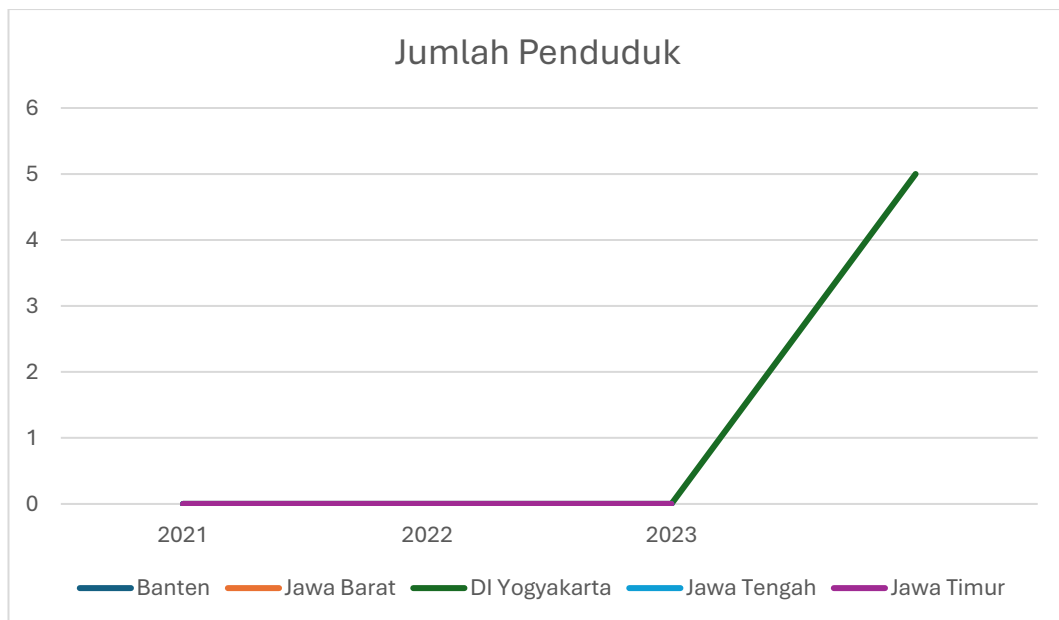
Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021-2023

Pada table 1.3 perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Pulau Jawa periode 2021–2023, terlihat bahwa mayoritas provinsi (Banten , Jawa Barat Jawa Tengah , dan Jawa Timur) menunjukkan nilai yang konstan atau tidak mengalami perubahan signifikan sepanjang tiga tahun tersebut. Namun, DI Yogyakarta memperlihatkan pola yang berbeda dengan peningkatan tajam pada tahun 2023 setelah sebelumnya stagnan di tahun 2021–2022. Hal ini menunjukkan bahwa pada sebagian besar provinsi di Jawa, partisipasi angkatan kerja relatif stabil, sementara DI Yogyakarta mengalami lonjakan yang cukup besar, yang dapat mengindikasikan adanya peningkatan serapan tenaga kerja atau dorongan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih efektif di daerah tersebut.

Faktor lain yang turut memengaruhi disparitas PAD adalah jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, semakin besar pula potensi objek pajak dan retribusi, terutama dari sektor konsumsi, dan layanan. Provinsi seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, yang memiliki populasi besar dan kepadatan tinggi, secara otomatis

memiliki basis pajak yang luas, yang mendukung tingginya PAD. Sementara itu, provinsi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil atau pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan mengalami keterbatasan dalam memperluas sumber-sumber PAD. Pendapat ini diperkuat oleh Musgrave dalam terjemahan oleh (Suparmoko, 2002), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar merupakan potensi ekonomi yang dapat mendorong peningkatan penerimaan daerah, terutama dalam bentuk pajak daerah yang berbasis konsumsi dan penggunaan jasa.

Gambar 1.4 Jumlah Penduduk Antar Provinsi di Pulau Jawa



Sumber : Badan Pusat Statistik 2021-2023

Berdasarkan grafik pada pada table 1.3 perkembangan Berdasarkan grafik jumlah penduduk di Pulau Jawa periode 2021–2023, terlihat bahwa sebagian besar provinsi (Banten , Jawa Barat Jawa Tengah , dan Jawa Timur) cenderung stabil tanpa menunjukkan perubahan yang berarti sepanjang periode tersebut. Sementara itu, DI Yogyakarta mengalami lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2023 setelah sebelumnya berada pada posisi stagnan di tahun 2021–2022. Pola ini menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk di Pulau Jawa relatif merata dan stabil,

dengan pengecualian DI Yogyakarta yang mengalami peningkatan signifikan, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor urbanisasi, migrasi, atau peningkatan angka kelahiran di wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti merumuskan beberapa alasan utama dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- (1) pentingnya mendorong peningkatan kemandirian fiskal antarprovinsi di Pulau Jawa melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang merupakan salah satu komponen krusial dalam mendukung daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan,
- (2) variabel-variabel seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta jumlah penduduk diduga memiliki kontribusi signifikan terhadap perbedaan kemampuan fiskal antarprovinsi dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun kajian yang menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara simultan dalam konteks regional di Pulau Jawa masih terbatas,
- (3) perlunya analisis empiris yang komprehensif untuk mengetahui sejauh mana pengaruh PDRB, TPAK, dan jumlah penduduk terhadap disparitas PAD antar enam provinsi di Pulau Jawa, sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang relevan bagi perumusan kebijakan fiskal.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penelitian ini mengangkat tema **“Analisis Faktor yang Mempengaruhi Disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar Provinsi di Pulau Jawa.”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Sejauh mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memengaruhi tingkat disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antar provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap kesenjangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antara provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa?
3. Seberapa besar dampak Jumlah Penduduk terhadap perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di wilayah Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis sejauh mana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Pulau Jawa.
2. Mengkaji pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap perbedaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di antara provinsi-provinsi yang terdapat di Pulau Jawa.
3. Menganalisis dampak Jumlah Penduduk terhadap kesenjangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di wilayah Pulau Jawa.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini disusun dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada, sehingga pembahasan difokuskan agar tetap terarah. Penelitian ini berfokus pada variabel dependen, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan variabel independen yang terdiri dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Jumlah

Penduduk. Ketiga variabel tersebut dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap disparitas PAD antarprovinsi di Pulau Jawa.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), dan Jumlah Penduduk terhadap disparitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) antarprovinsi di Pulau Jawa. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi akademik dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan program yang efektif untuk menjaga kestabilan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa. Dengan memahami faktor-faktor seperti PDRB, TPAK, dan Jumlah Penduduk yang memengaruhi PAD antarprovinsi, pemerintah diharapkan mampu menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dalam mengurangi kesenjangan fiskal serta meningkatkan kemandirian daerah.

3. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya

Pada penelitian ini, peneliti berharap agar dapat menjadi sebuah referensi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai

topik terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Pulau Jawa maupun wilayah lainnya dengan variabel yang sama maupun berbeda. Selain itu, Hasil penelitian ini juga dapat meningkatkan literatur di bidang ekonomi, khususnya yang berkaitan mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta dapat membuka peluang untuk penelitian lebih mendalam mengenai faktor lain yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di regional maupun nasional.